



Perppu Lindungi Kedaulatan

BULUSTALAN - Sedikitnya 300 peserta dari berbagai kalangan menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) mengupas Perppu No 2 Tahun 2017 yang digelar DPD KNPI Kota Semarang di Hotel Siliwangi Semarang, Sabtu (19/8) malam.

Sejumlah akademisi perguruan tinggi Kota Semarang, diantaranya Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA (Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo), Prof Dr Mahmutarom MHum (Rektor Unwahas Semarang), Dr Teguh Yuwono MPol Admin (Pakar Ilmu Politik Undip) dan Dr Eny Purwanti SH MHum (Pakar Hukum Tata Negara Undip) menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Diskusi dihadiri berbagai kalangan, dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa dan ormas ini membuka pandangan terhadap upaya melindungi kedaulatan negara daripada isu pemberangusan kemerdekaan berserikat.

Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA sebagai narasumber disku-

si mengungkapkan bahwa seolah-olah Perppu No 2 tahun 2017 ini muncul karena persoalan HTI. Padahal HTI sudah dibubarkan sebelum lahirnya Perppu. HTI sendiri menurut Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA dibubarkan tidak melalui Perppu melainkan keputusan politik. "Saya menilai, sebenarnya Perppu ini bagus, namun sayangnya momen dan casing-nya tidak bagus. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak menecerai negara Indonesia sebagai negara hukum", ujar Prof Dr Ahmad Rofiq MA.

Menurut Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, adanya ormas anti Pancasila seperti HTI yang kemudian menjadi besar juga karena adanya pembiaran dari

pemerintah. "Padahal hal ini sudah pernah saya serukan kepada polisi untuk menangkap mereka yang sudah nyata-nyata anti Pancasila, namun karena payung hukum subversif sudah dicabut, polisi jadi tidak dapat berbuat apa-apa", ungkapny.

Isu khilafah yang ingin mengganti Pancasila menurut KH Ahmad Rofiq kurang pas dan bertentangan dengan komitmen pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Bagaimana mungkin mereka ingin mengganti khilafah, mereka kan tidak ikut berdarah-darah mendirikan bangsa ini. Karena itulah sangat wajar kalau banyak yang marah ketika ada yang ingin menggeser Pancasila", lanjutnya.

KH Ahmad Rofiq juga menegaskan bahwa kunci penanganan ada pada pemimpin. Karenanya pemimpin harus adil, sebab bila tidak adil yang terjadi adalah saling memangsa. Untuk mengakkan NKRI menurutnya harus hindari radikalisme agama, hindari radi-

kalisme sekuler dan siapapun yang hidup di Indonesia berke-wajiban menjaga Pancasila, NKRI, UUD45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara Dr Teguh Yuwono MPol Admin menegaskan bahwa negara ini dibangun bukan untuk clas atau konflik. Negara tidak membiarkan kelompok-kelompok berkelahi sendiri. Karena bernegara itu ada tatanannya. Ketika negara didirikan, orang bersepakat bahwa kekerasan yang sah di tangan negara. "Perppu ada tidak hanya untuk membubarkan HTI saja, melainkan juga mengatur ormas yang separatis atau subversif," kata Teguh Yuwono.

Prof Dr Mahmutarom MHum mengatakan apapun bentuknya, termasuk Perppu No 2 Tahun 2017 ini adalah produk hukum yang mengatur dan harus dijunjung tinggi. Rektor Unwahas Semarang ini mencontohkan pada kasus narapidana korupsi yang ternyata jumlahnya paling banyak dan ternyata mereka merasa di penjara itu bagai menjadi ibadah haji. Mahmutarom khawatir sanksi hukum justru tidak dapat memberikan efek jera.

Sedangkan Dr Eny Purwanti SH MHum mengutip mantan Guru Besar Hukum Undip Alm Prof Dr Satjipto Rahardjo bahwa sejak lahir, Undang-undang telah cacat hukum. Perppu diharapkan dapat menutup celah tersebut.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang Drs Isdiyanto yang hadir mewakili Walikota Semarang Hendrar Prihadi menutup FGD bertemakan 'Menguatkan Rajut Keindonesiaan, Indonesia bebas dari Paham Anti Pancasila' menguatkan substansi Perppu No 2 Tahun 2017, bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. ■ Weynes-rth



DISKUSI KEBANGSAAN: Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA (kiri) mengupas Perppu No 2 Tahun 2017 dalam FGD yang digelar DPD KNPI Kota Semarang di Hotel Siliwangi Semarang, Sabtu (19/8) malam. ■

Foto: Weynes-rth